

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fenomena pengangguran dan kemiskinan masih menjadi salah satu fokus utama bagi pemerintah untuk terus mencari solusi yang efektif untuk menangani masalah tersebut. Isu kemiskinan termasuk dalam masalah kemanusiaan yang membutuhkan upaya yang sangat terintegrasi untuk dapat mengatasinya. Tidak hanya satu dua usaha yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi hal tersebut, baik itu dalam bentuk kebijakan ataupun program. Melihat fenomena tersebut, pemerintah telah meresmikan beberapa program yang bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia. Program Rumah Padat Karya adalah salah satu program baru yang diresmikan oleh pemerintah kota Surabaya sebagai bentuk upaya dalam mengurangi jumlah kemiskinan di kota Surabaya. Program Rumah Padat Karya sendiri merupakan program baru yang diresmikan oleh pemerintah, namun sudah memperlihatkan awal yang baik dalam pelaksanaannya.

Rumah Padat Karya telah menghasilkan banyak program seperti adanya pelatihan, pemasaran produk, hingga pemberian bantuan modal untuk memberdayakan UMKM yang ada di Kota Surabaya. Program-program yang telah dijalankan tersebut berisikan para anggota MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) untuk dapat mendapatkan penghasilan yang lebih memadai. Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) merupakan masyarakat

dengan penghasilan rendah dan memiliki keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat bantuan dari pemerintah. Para MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) diberikan pelatihan serta diberikan fasilitas berupa alat dan bahan, lalu ditingkatkan dan diberdayakan yang nantinya akan disediakan pasarnya untuk mengembangkan usaha yang telah dilakukan saat pelatihan. Tidak hanya itu, banyaknya lahan yang terbengkalai atau tidak terpakai diubah oleh Pemerintah Kota Surabaya untuk dijadikan tempat usaha para MBR yang harus dikembangkan dan dikelola.

Pelatihan yang diberikan oleh Pemkot Surabaya ada berbagai macam mulai dari menjahit, membuat paving, bertani, atau berkebun. Sedangkan untuk sisanya dimanfaatkan dengan dibangun menjadi tempat cuci motor dan mobil, laundry, café, ataupun rumah produksi batik. Program Rumah Padat Karya ini memiliki filosofi dan harapan yang terkandung di dalamnya, dimana Warga Kota Surabaya berhasil mendapatkan pekerjaan dan juga penghasilan dengan cara gotong-royong (Surabaya.go.id, 2022). Setelah berjalan beberapa bulan usai diresmikan, telah banyak MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) terserap dalam program padat karya ini. Hingga pada bulan Juni tercatat terdapat ratusan dari masyarakat yang telah berhasil terserap dan menghasilkan penghasilan dari ratusan hingga jutaan rupiah (Liputan6.com, 2022). Penghasilan tersebut berasal dari berbagai macam usaha atau UMKM yang telah dijalankan selama beberapa bulan setelah disahkannya Program Padat Karya ini. Sehingga, untuk ukuran awal berjalannya suatu program dapat dikatakan sebagai awal yang baik.

Diresmikannya program ini bertujuan untuk mengurangi adanya pengangguran, memperbaiki ekonomi kota, dan juga menurunkan angka kemiskinan terlebih di Kota Surabaya. Berdasarkan dengan data tercantum pada Badan Pusat Statistika yang ada, jumlah dari masyarakat miskin adalah:

Tabel 1.1 Persentase dan Jumlah Masyarakat Miskin

Tahun	Persentase Masyarakat Miskin	Jumlah Masyarakat Miskin
2018	4,88%	140.810
2019	4,51%	130.550
2020	5,02%	145.670
2021	5,23%	152.489
2022	4,72%	138.210

Sumber: Badan Pusat Statistika Kota Surabaya 2020

Pada Agustus 2021 adalah 5,23% atau setara dengan 152 ribu jiwa yang dimana mengalami peningkatan 0,21% dari tahun 2020 yakni 5,02% atau setara dengan 145 ribu jiwa (Jawapos.com, 2022). Melihat dari tabel diatas kemiskinan mengalami peningkatan yang cukup signifikan setiap tahunnya. Pada awal tahun 2022, tercatat jumlah masyarakat miskin di Kota Surabaya mengalami penurunan sebanyak 14ribu jiwa atau 0,6% menjadikan jumlah masyarakat miskin di Kota

Surabaya pada tahun 2022 sekitar 138.210 jiwa atau 4,72% dibandingkan dengan tahun 2021.

Sedangkan, untuk jumlah masyarakat yang pengangguran atau tidak mempunyai pekerjaan tercatat dalam Data Badan Pusat Statistik Kota Surabaya pada bulan Agustus 2019, tingkat pengangguran terbuka mencapai 5,76% (bps.go.id, 2022). Parahnya ditambah dengan fenomena datangnya pandemi *Covid-19* yang berlangsung dalam 2 tahun lamanya hingga saat ini, terdapat fakta di dalamnya bahwa banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaannya entah itu karena bangkrut atau PHK yang dipilih oleh perusahaan akibat adanya krisis menjadi salah satu dampaknya. Hal tersebut menimbulkan adanya peningkatan angka pengangguran yang cukup signifikan di Indonesia. Tercatat dalam Badan Pusat Statistik Kota Surabaya tingkat masyarakat pengangguran dari tahun 2018-2022 adalah:

Tabel 1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tahun	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	Jumlah Pengangguran Terbuka
2018	6,01%	92.914
2019	5,76%	91.557
2020	9,79%	154.896
2021	9,68%	152.200
2022	7,62%	114.300

Sumber: Badan Pusat Statistika Kota Surabaya 2021

Berdasarkan dengan data diatas bulan Agustus 2020 yang dimana setahun kemudian mengalami peningkatan menjadi 9,79% atau setara dengan 154,8 ribu masyarakat pengangguran di Kota Surabaya (bps.go.id, 2021). Peningkatan tersebut bukanlah jumlah yang sedikit, bisa dikatakan sebagai peningkatan tertinggi jika melihat tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, dengan adanya pandemi Covid-19 perekonomian Indonesia mengalami penurunan yang cukup drastis, baik itu dalam sektor pariwisata, sektor industri, dan juga kegiatan ekspor impor yang mengalami penurunan. Sehingga, tidak heran jika Kota Surabaya juga terkena akan dampak krisis ekonomi yang disebabkan oleh Pandemi Covid-19. Namun, jika dilihat dari tahun 2021 hingga 2022 tingkat pengangguran di Kota Surabaya telah mengalami penurunan sekitar 2%.

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 pasal 1 ayat 2 tentang Penangan Fakir Miskin, penanganan fakir miskin merupakan upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. Sehingga, dalam hal ini pemerintah sebagai pemangku kebijakan haruslah mampu memutar otak dalam menangani masalah tersebut dan membuat kebijakan ataupun program yang tentunya bermanfaat bagi kehidupan masyarakat dan juga daerahnya masing-masing.

Dalam hal ini, Program Rumah Padat Karya merupakan salah satu usaha yang dikerahkan pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran

yang ada di Kota Surabaya. Penyelenggaraan Program Padat Karya sendiri telah tercantum dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 70 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Padat Karya Di Lingkungan Kementerian Perhubungan, bahwa untuk percepatan penanggulangan kemiskinan, perlu percepatan pelaksanaan program padat karya yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja. Maka dari itu, Pemerintah Kota Surabaya meresmikan Program Rumah Padat Karya sebagai bentuk perealisasi Peraturan Menteri tersebut.

Selain itu, diresmikannya Program Rumah Padat Karya selaras dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 83 Tahun 2023 tentang Program Padat Karya di Kota Surabaya. Dimana, padat karya merupakan kegiatan yang bersifat pemberdayaan masyarakat kepada keluarga miskin yang bersifat produktif. Dengan pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja, dan teknologi lokal. Bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan serta pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan meningkatkan daya beli masyarakat. Program Padat Karya ini menggunakan cadangan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk program pembangunan fisik dengan metode swakelola, padat karya, tenaga lokal, dan selesai dalam waktu 3 sampai 4 bulan. Sehingga, Program Padat Karya sebagai bentuk upaya dari Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) yang ada di beberapa kecamatan Kota Surabaya. (RPJMD Kota Surabaya 2021-2026)

Program Rumah Padat Karya ini sendiri bertujuan untuk menyerap Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk dapat meningkatkan penghasilannya setiap bulannya. Program ini diandalkan untuk dapat mengentaskan 900 ribu masyarakat Kota Surabaya yang termasuk dalam kondisi MBR, dimana jumlah tersebut mengalami peningkatan yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Sebab, sebelum pandemi seharusnya mereka tidak termasuk dalam MBR, tetapi karena adanya pandemi Covid-19 yang berjalan cukup lama menjadikan mereka kedalam kategori MBR. Untuk itu, Eri Cahyadi selaku Walikota Kota Surabaya membuat Program Rumah Padat Karya. Disahkannya program rumah padat karya juga relevan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 pasal 17 tentang Penangan Fakir Miskin, pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan akses kesempatan kerja dan berusaha, yang dilakukan melalui upaya: a) Penyediaan informasi lapangan kerja, b) Pemberian fasilitas pelatihan dan keterampilan, c) Peningkatan akses terhadap pengembangan usaha mikro, dan/atau, d) Penyediaan fasilitas bantuan permodalan. Sehingga, dalam ini pemerintah Kota Surabaya telah melakukan hal yang tepat. Berdasarkan dengan undang-undang yang telah ada.

Program Rumah Padat Karya telah diresmikan pada tanggal 25 Maret 2022 oleh Walikota Surabaya. Dilansir dari www.tempo.co terdapat ratusan MBR yang telah terserap melalui program ini. Banyak pula tempat yang merupakan aset kota yang terbengkalai diubah menjadi tempat usaha bagi masyarakat, entah itu dalam bentuk café, tempat laundry, tempat cuci mobil dan motor, tempat menjahit, pertanian, padi, peternakan ayam pedaging, budidaya lele dan nila,

tempat potong rambut, dan masih banyak lagi. Bahkan dari hasil program tersebut telah menghasilkan ratusan hingga jutaan rupiah setiap bulannya, yang tentunya sangat membantu masyarakat yang memiliki penghasilan rendah.

Gambar 1.1 Program Rumah Padat Karya



Sumber: Republika.co.id

Selama beberapa bulan berjalannya program rumah padat karya ini, telah berhasil mendirikan rumah padat karya yang telah tersebar di 31 kecamatan di kota Surabaya. Hingga saat ini, berdasarkan informasi yang tersebar telah ada 20 jenis rumah padat karya yang telah terdaftar dalam sistem aplikasi Pemkot Kota

Surabaya. Rumah padat karya telah menyerap ratusan orang dari MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) sebagai tenaga kerja (nasional.tempo.co, 2022). Bentuk dari klasifikasi usaha yang ada di Rumah Padat Karya dapat disesuaikan dengan potensi yang ada di masing-masing wilayahnya. Dengan kata lain pemerintah akan melihat terlebih dahulu usaha apa yang cocok untuk dilakukan untuk aset tersebut, lalu mereka akan menawarkan kepada MBR atau kepada penduduk yang belum memiliki pekerjaan untuk memilih usaha apa yang diinginkan, sehingga nantinya dari pihak pemerintah akan memberikan modal untuk usaha. Maka dari itu, fokus utama adanya Rumah Padat Karya ini adalah pengelolaan terhadap lahan yang terbengkalai dan dimanfaatkan untuk menjadi sumber pendapatan warga khususnya MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah).

Melihat dari tujuan disahkannya program rumah padat karya ini adalah untuk mengentaskan kemiskinan dan mengurangi adanya pengangguran di kota Surabaya, maka yang menjadi pertanyaan besar adalah tepatkah program ini untuk mengentaskan masalah tersebut. Implementasi program ini perlu ditelusuri lebih lanjut dan diikuti perkembangannya. Sudah tepat sasaran atau sudah dapat memberikan dampak yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat atau justru sebaliknya. Disahkannya program ini terdapat harapan yang sangat besar bagi masa depan masyarakat dan kota Surabaya sendiri. Sehingga, Walikota Kota Surabaya memiliki harapan dan cita-cita yang cukup besar terhadap program rumah padat karya ini, yakni mengurangi MBR hingga 300 ribu jiwa pada akhir tahun ini. Harapan tersebut tentu saja akan menjadi angan belaka jika implementasi dari program rumah padat karya ini tidak berjalan dengan baik.

Entah itu dalam ketepatan sasaran ataupun dari peran pemerintah yang kurang maksimal.

Wonocolo merupakan salah satu kecamatan yang telah memiliki rumah padat karya, bahkan rumah padat karya di kecamatan wonocolo telah memiliki nama sebutannya sendiri yakni Rumah Glowing yang merupakan singkatan dari Galeri Halaman Wonocolo Connecting, yang berarti sentra potensi yang ada di wilayah wonocolo. Dilansir dari www.kompas.com yang ada Rumah Glowing di Kecamatan Wonocolo telah menyerap sebanyak 32 jiwa meliputi 10 MBR di bidang jasa Servis, 10 MBR di bidang konveksi jahit dan border, 4 MBR untuk cutting sticker dan juga 8 MBR dalam bidang cuci motor dan mobil (kompas.com, 2022). Rumah Glowing yang ada di Kecamatan Wonocolo merupakan salah satu rumah padat karya yang bersifat mikro. Informasi tersebut diluncurkan pada 2 bulan lalu, sehingga diperlukan adanya *update* mengenai perkembangan Rumah Glowing di Kecamatan Wonocolo ini. Tolak ukur keberhasilan dari program Rumah Padat Karya ini sendiri tidak luput dari peran pemerintah Kota Surabaya sebagai pemangku kebijakan sekaligus penanggung jawab dari jalannya program ini dalam mewujudkan tujuannya. Pemerintah Kota Surabaya diharapkan dapat dengan bijak menggerakkan para MBR untuk terus berusaha mendapatkan hidup yang lebih baik. Kecamatan Wonocolo sendiri merupakan satu dari 31 kecamatan yang telah berhasil mendirikan Rumah Padat Karya dan menyerap puluhan MBR serta mendapatkan pendapatan setiap bulannya.

Penelitian ini sendiri didasarkan pada identifikasi Implementasi Program Rumah Padat Karya di Kota Surabaya sebagai salah satu program pengentas

kemiskinan dan pengangguran, bagaimana implementasi dari program Rumah Padat Karya sudah berjalan dengan baik atau justru terbengkalai hingga akhirnya tidak sesuai dengan harapan dan cita-cita Walikota Kota Surabaya Eri Cahyadi untuk mengurangi jumlah MBR di kota Surabaya sebanyak 300 ribu akhir tahun 2022. Dikarenakan program ini yang baru saja disahkan beberapa bulan lalu, sehingga penelitian ini bermaksud untuk mengikuti perkembangannya selama setahun kedepan. Selama satu tahun pelaksanaan program tersebut telah terdapat perkembangan apa yang telah dicapai program ini dalam jangka waktu yang telah ditentukan, meliputi telah berhasil memberikan kehidupan yang layak bagi masyarakat kota Surabaya atau bahkan tidak memberikan dampak yang signifikan bagi kehidupan masyarakat Kota Surabaya. Implementasi dari program Rumah Padat Karya sendiri tidak luput dari faktor yang menghambat serta faktor pendukung dari keberhasilan atau belum maksimalnya program tersebut. Maka dari itu, penelitian ini juga bermaksud untuk menggali apa saja faktor-faktor pendorong dan juga hambatan dalam pelaksanaan program rumah padat karya ini.

Hal inilah yang membuat penulis merasa terdorong untuk mengetahui dan menjelaskan lebih dalam mengenai bagaimana implementasi Rumah Padat Karya di kecamatan Wonocolo Kota Surabaya dalam rangka mengurangi kemiskinan dan pengangguran, bagaimana perkembangan program Rumah Padat Karya selama satu tahun diterapkannya, serta bagaimana peran pemerintah dalam pelaksanaan program Rumah Padat Karya di Kota Surabaya. Berdasarkan dengan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan

judul “Implementasi Program Rumah Padat Karya Dalam Rangka Mengurangi Angka Kemiskinan Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya Periode 2022-2023 ”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dituliskan di atas, maka dapat diambil rumusan masalah dari penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi dari Program Rumah Padat Karya di Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya dalam rangka mengurangi kemiskinan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan pemaparan dalam rumusan masalah di atas, maka penelitian ini menjawab pertanyaan rumusan masalah dengan tujuan:

1. Untuk menganalisis implementasi Program Rumah Padat Karya di Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya, sebagai program pengentasan kemiskinan dan pengurangan angka pengangguran. Implementasi tersebut mencakup beberapa hal yakni mengetahui perkembangan pelaksanaan program rumah padat karya selama satu tahun diterapkan di masyarakat Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya, serta manfaat apa saja yang telah diberikan semenjak diresmikannya program tersebut bagi masyarakat.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini mengandung kegunaan serta manfaat yang dapat diambil dari segi praktis maupun teori, meliputi:

1.4.1 Manfaat Praktis

Dapat memberikan tambahan pemikiran baru bagi pemerintah Kota Surabaya dalam rangka pelaksanaan program padat karya sehingga dapat mengetahui bahwa program tersebut membutuhkan pengembangan kembali atau bahkan sudah menjadi program yang tepat untuk mengentaskan kemiskinan dan mengurangi pengangguran di Kota Surabaya. Dalam artian bahwa program tersebut telah berhasil sesuai dengan tujuan atau justru sebaliknya. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan maupun perbandingan dalam mengembangkan penelitian mengenai implementasi Program Rumah Padat Karya di Kota Surabaya.

1.4.2 Manfaat Teori

Hasil penelitian diharapkan ini dapat berguna sebagai referensi bagi peneliti lain yang sejenis, dan juga diharapkan hasil penelitian ini mampu menjadi referensi yang berguna dalam penilaian mengenai implementasi dilaksanakannya program padat karya mengalami keberhasilan dalam mewujudkan cita-cita dan harapan Walikota Surabaya dalam mengentaskan kemiskinan dan pengangguran, serta mampu dijadikan sebagai sumber pengetahuan tentang Program Rumah Padat Karya bagi mereka yang belum mengetahuinya.

1.5 Penelitian Terdahulu

No.	Judul/ Peneliti/Tahun	Fokus Kajian	Metode dan Teori yang Digunakan	Hasil Penelitian
1.	Implementasi Program Padat Karya: Studi Kasus tentang Pelaksanaan Program Padat Karya di Kelurahan Ciracas Kecamatan Ciracas Jakarta Timur/Tjitjik Rahayu/2007	Fokus kajian penelitian ini adalah pelaksanaan program “Padat Karya”, indikator, dan beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program tersebut di Ciracas, Jakarta Timur	Kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif Teori: - Kemiskinan - Kebijakan mengatasi kemiskinan. - Implementasi kebijakan.	Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan program Jaring Pengaman Sosial saat ini menjadi rangkaian pelaksanaan program jangka pendek untuk menyelamatkan orang miskin dan krisis. Diharapkan program ini dapat dilanjutkan pada program jangka menengah dan jangka panjang melalui perubahan struktur sosial ekonomi yang benar dan normal.
2.	Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Padat Karya Tunai (Studi Kasus Desa Plandaan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung)/ Tiara Rama Dian & Muhammad Farid Ma'ruf/ 2019	Fokus kajian penelitian ini adalah mendeskripsikan tahapan-tahapan pemberdayaan masyarakat melalui program padat karya tunai.	Kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. - Pemberdayaan masyarakat - Padat Karya Tunai	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat Desa Plandaan melalui program padat karya tunai berjalan dengan baik. Tahap persiapan sampai tahap terminasi telah menunjukkan bahwa pemerintah Desa Plandaan sudah berusaha keras dalam melaksanakan tahap demi tahap dalam pemberdayaan masyarakat sehingga meningkatkan daya beli masyarakat.
3.	Implementasi Kebijakan Padat Karya Tunai (PKT)	Fokus kajian penelitian ini adalah	Kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan

	<p>pada Masyarakat Miskin di Desa Lebih, Gianyar/ Anak Agung Gde Rai Budiasa, A.A. Gede Raka, dan I Made Mardika/ 2019</p>	<p>implementasi kebijakan PKT di Desa Lebih, Gianyar, faktor-faktor pendukung dan penghambat kebijakan Padat Karya Tunai, serta dampak yang diberikan dari implementasi kebijakan PKT terhadap masyarakat miskin di Desa Lebih, Gianyar.</p>	<p>Teori:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Implementasi kebijakan publik - Padat Karya Tunai (PKT) - Masyarakat Miskin 	<p>PKT di Desa Lebih, dimana PKT terlaksana dengan baik seperti pelaksanaan kegiatan prioritas penggunaan dana desa, pelaksanaan kegiatan PKT secara swakelola, pembayaran upah secara tunai, serta keterlibatan masyarakat sebagai pelaksana swakelola. Faktor-faktor pendukung kebijakan PKT, meliputi: kebijakan pemerintah, kelembagaan desa, kesediaan tenaga kerja dan jenis pekerjaan, serta faktor-faktor penghambat kebijakan PKT , meliputi: penyelarasan perencanaan desa dan keahlian pekerja. Dampak implementasi kebijakan PKT terhadap masyarakat miskin di desa lebih meliputi: dampak ekonomi, social, dan budaya.</p>
--	--	--	---	---

4.	Implementasi Program Padat Karya Tunai dalam Mengurangi Pengangguran di Desa Wonoenggal, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo/ Astuti Sri Pawenang & Puji Lestari/ 2020.	Fokus kajian penelitian ini adalah implementasi Program Padat Karya Tunai dalam mengurangi pengangguran, faktor pendukung, faktor penghambat, serta dampak implementasi program padat karya tunai Desa Wonoenggal, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo.	Kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Teori: - Implementasi kebijakan - Padat Karya Tunai - Pemberdayaan Masyarakat - Pengangguran	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program padat karya tunai Desa Wonoenggal, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo cukup efektif untuk masyarakat menganggur dengan faktor pendukung adanya sumber daya manusia yang memadai dan kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Selain itu, terdapat faktor penghambat yakni terdapat pada pelaksanaan teknis. Adanya program padat karya tunai ini memberikan dampak terhadap masyarakat dengan menambah pendapatan dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat menganggur.
5.	Implementasi Program Padat Karya Tunai Dari Dana Desa dalam Mengatasi Kemiskinan Masyarakat Desa Karang Gading/ Hajar Risa, Badaruddin, Munir Tanjung/ 2021	Fokus kajian penelitian ini adalah menganalisis implementasi, kendala-kendala, dan dampak implementasi program Padat Karya Tunai Desa Karang Gading terhadap	Kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif Teori: - Implementasi kebijakan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program padat karya tunai dari dana desa Karang Gading pada kegiatan rabat beton penimbunan sirtu pada Dusun VI untuk tahun 2020 hasilnya belum berjalan maksimal yang disebabkan komunikasi yang belum maksimal,

		kemiskinan masyarakat Desa Karang Gading Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang.		Sumber Daya belum mencukupi, struktur birokrasi belum sepenuhnya tertata dengan baik, dan hanya disposisi/sikap sudah cukup memadai.
6.	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Rumah Padat Karya <i>Viaduct by Gubeng</i> di Kota Surabaya / 2023	Fokus kajian dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan mengenai pemberdayaan masyarakat melalui Program Rumah Padat Karya <i>Viaduct by Gubeng</i> di Kota Surabaya.	Kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif Teori: - Tujuan pemberdayaan masyarakat	Hasil penelitian menunjukkan bahwa program yang dijalankan belum berjalan dengan maksimal, hal tersebut dikarenakan terdapat tujuan dari pemberdayaan masyarakat yang belum tercapai.

Implementasi program padat karya juga ditemukan pada beberapa penelitian terdahulu, meskipun dengan fokus yang berbeda-beda dan terjadi di beberapa daerah yang berbeda. Khususnya yakni penyerapan program padat karya menjadi berbagai macam program dengan tujuan yang sama, seperti adanya program padat karya tunai yang dilaksanakan di beberapa daerah. Perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian ini terletak pada nama program yang telah diresmikan, yakni Program Rumah Padat Karya yang ada di Kota Surabaya, bentuk dari program itu sendiri. Dimana Program Rumah Padat Karya ini merupakan program yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat lalu diserap

kedalam UMKM yang telah didanai oleh pemerintah kota Surabaya. UMKM tersebut dapat dikatakan sebagai lapangan kerja yang didalamnya menyerap masyarakat yang menganggur ataupun masyarakat yang berpenghasilan rendah. Yang mana program ini diresmikan sebagai bentuk serapan dari Peraturan Menteri yakni padat karya. Tidak hanya itu, program rumah padat karya ini merupakan program baru yang mana dapat dikatakan bahwa penelitian ini merupakan penelitian baru. Mengingat program ini masih beberapa bulan diresmikan. Fokus dari penelitian ini sendiri adalah mengetahui implementasi Program Rumah Padat Karya di Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya, sebagai program pengentasan kemiskinan dan pengurangan angka pengangguran. Implementasi tersebut mencakup beberapa hal yakni mengetahui perkembangan pelaksanaan program rumah padat karya selama satu tahun diterapkan di masyarakat Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya, serta manfaat apa saja yang telah diberikan semenjak diresmikannya program tersebut bagi masyarakat.

1.6 Kajian Teori

Konsep dan teori dasar yang digunakan sebagai landasan dan rujukan tentu saja bertujuan untuk mempermudah proses pemahaman terhadap permasalahan penelitian. Berdasarkan dengan permasalahan penelitian ini maka konsep dari Implementasi Kebijakan digunakan untuk menganalisis pelaksanaan program Rumah Padat Karya Kecamatan Wonocolo. Berikut merupakan pembahasan secara rinci terkait dengan konsep dan teori dasar yang akan digunakan dalam penelitian ini.

1. Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan sebuah upaya untuk menciptakan adanya hubungan yang memungkinkan bagi kebijakan yang telah diresmikan dapat direalisasikan sebagai sebuah aktivitas pemerintah. Upaya-upaya yang ada di desain dengan harapan dapat mewujudkan menjadi tujuan awal dari diresmikannya program tersebut. Implementasi menurut Ripley dan Franklin (Budi Winarno, 2014:148) merupakan apa yang telah terjadi setelah adanya penetapan dari Undang-Undang yang memberikan program, kebijakan, keuntungan atau sebuah keluaran nyata. Selanjutnya dalam suatu negara memiliki masalah publik yang tidak bisa diselesaikan begitu saja atau perorangan, serta membutuhkan adanya pemecahan masalah yang efektif dan efisien. Maka, diperlukan adanya proses perumusan masalah dan penetapan kebijakan yang cocok dan sesuai dengan masalah publik yang tengah dihadapi (Tachjan, 2006). Implementasi kebijakan publik dapat diartikan dengan aktivitas untuk menyelesaikan atau melaksanakan kebijakan yang telah diresmikan/ditetapkan/disetujui dengan menggunakan sarana (alat) untuk mencapai tujuan dari kebijakan tersebut (Tachjan, 2006). Menurut Tachjan (2006), implementasi kebijakan dipahami sebagai salah satu aktivitas dari administrasi publik sebagai birokrasi dalam proses kebijakan publik. Implementasi kebijakan sendiri memiliki kedudukan yang

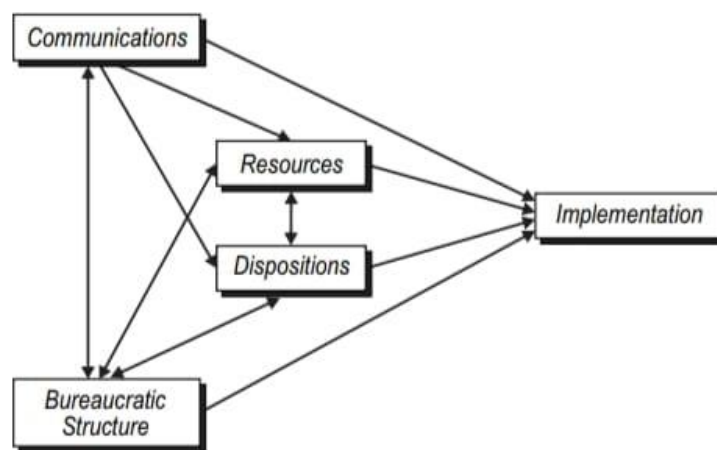
cukup penting dalam proses kebijakan, sehingga implementasi kebijakan haruslah mendapatkan perhatian.

Dalam implementasi kebijakan memerlukan adanya tenaga kerja, uang, serta kemampuan organisasi. Implementasi kebijakan sendiri dapat dilihat dari beberapa pandangan atau perspektif atau pendekatan. Salah satu perspektif tersebut datang dari Edward III (1980: 9-10), dimana Edward III mengajukan adanya pendekatan masalah implementasi dengan terlebih dahulu mengemukakan dua pertanyaan pokok, yakni a.) Faktor apa yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan? b.) Faktor apa yang menghambat keberhasilan implementasi kebijakan?

Menurut teori implementasi kebijakan yang di kemukakan oleh Edward III (1980:1) merupakan sebuah proses yang sangat krusial, sebab seberapa baiknya suatu kebijakan jika tidak ada persiapan dan rencana yang baik dalam implementasinya maka apa yang menjadi tujuan dari kebijakan tersebut tidak akan terwujud. Sebaliknya, jika persiapan serta perencanaannya berjalan dengan baik, tetapi kebijakannya tidak dirumuskan dengan maka hasilnya pun sama saja yakni tujuan dari kebijakan tersebut tidak akan tercapai. Berdasarkan dengan kedua pernyataan tersebut menurut kerangka pikir dari Edward III (1984) (dalam Tachjan, 2006) dapat dirumuskan empat faktor yang merupakan syarat utama keberhasilan proses dari implementasi yakni:

1. komunikasi (*communication*),
2. sumber daya (*resources*),
3. Disposisi (*Dispositions*) atau Sikap Pelaksana Birokrasi, serta adanya
4. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*).

Gambar 1.2 Faktor-faktor Implementasi Kebijakan



Gambar 2.5. *Direct and Indirect Impact on Implementation*

Sumber: George Edwards III, 1980 : 148

Sumber: Dr. Tachjan (2006), Implementasi Kebijakan

Dengan empat faktor tersebut menjadi kriteria penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan publik. Dimana diantara aktor-aktor tersebut terjadi adanya interaksi serta pada gilirannya berpengaruh pada implementasi. Dimana menurut Edward III (dalam Mulyadi, 2015) tanpa adanya implementasi yang efektif maka keputusan dari pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan merupakan aktivitas

yang terlihat setelah adanya pengarahan yang berasal dari suatu kebijakan yang meliputi usaha atau upaya dalam mengelola input untuk menghasilkan output bagi masyarakat.

Pada kaitannya dengan penelitian ini adalah, implementasi dari program Rumah Padat Karya sebagai salah satu bentuk kebijakan yang diresmikan oleh pemerintah kota Surabaya untuk memecahkan adanya masalah publik di Kota Surabaya yakni kemiskinan dan pengangguran. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Tachjan (2006) bahwa implementasi kebijakan publik merupakan aktivitas untuk menyelesaikan atau melaksanakan kebijakan yang telah diresmikan/ditetapkan/disetujui dengan menggunakan sarana (alat) untuk mencapai tujuan dari kebijakan tersebut. Sehingga, dalam menentukan pelaksanaan atau implementasi dari sebuah program dibutuhkan adanya faktor seperti yang dikemukakan oleh Edward III. Maka dari itu, dibutuhkan adanya Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan juga Struktur Birokrasi dalam menilai pelaksanaan program. Dalam hal ini Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Briokrasi diposisikan sebagai faktor kepemilikan atau hal yang harus dimiliki oleh pemerintah dalam pelaksanaan program. Sedangkan, komunikasi merupakan salah satu aktivitas yang harus dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat sebagai penunjang keberjalanan program. Oleh karena itu, dalam penelitian ini empat faktor

tersebut digunakan sebagai penentu pelaksanaan atau implementasi Program Rumah Padat Karya di Kecamatan Wonocolo.

1.7 Operasionalisasi Konsep

a. Implementasi Kebijakan

Teori Implementasi oleh Edwards III merupakan sebuah kerangka kerja berisi mengenai identifikasi faktor-faktor kunci yang dapat memengaruhi implementasi kebijakan atau program tersebut. Dalam teori implementasi menurut Edwards III mencakup empat indikator utama yang dapat dijadikan dasar dalam mengidentifikasi implementasi program. Breakdown teori implementasi dengan fokus pada empat utama: komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi, dan tatanan birokrasi, sebagai berikut:

1. **Komunikasi**, sendiri mengacu pada sejauh mana informasi terkait dengan kebijakan dan program yang disampaikan dengan efektif kepada para pelaksana program dan penerima manfaat dari program. Dari indikator komunikasi tersebut dapat diuraikan menjadi beberapa indikator seperti berikut:

- a) Jumlah Pertemuan dan sosialisasi, dapat diartikan dengan jumlah pertemuan yang dilaksanakan oleh pemerintah sebagai penyelenggara program dengan pihak-pihak terkait untuk memberikan informasi.
- b) Ketersediaan Materi Komunikasi, merupakan ketersediaan serta distribusi materi komunikasi yang disampaikan dalam

bentuk brosur, pamflet, atau media sosial dengan tujuan untuk menjelaskan tujuan dan manfaat program.

- c) Jaringan dalam Komunikasi, merupakan kualitas serta keberlanjutan dari jaringan komunikasi yang terjalin antara berbagai pihak yang terlibat di dalam implementasi.
- d) Pelatihan serta Pendidikan, dapat diartikan sebagai program pelatihan dengan tujuan untuk memastikan bahwa para pelaksana dan pemangku kepentingan kebijakan memahami sepenuhnya kebijakan.

2. **Sumber Daya**, dapat didefinisikan dengan adanya ketersediaan ketersediaan dan alokasi sumber daya yang nantinya diperlukan dalam melaksanakan kebijakan atau program yang telah disahkan. Dalam indikator sumber daya tersebut dapat diuraikan menjadi beberapa indikator seperti berikut:

- a) Anggaran atau dana, merupakan jumlah dana atau anggaran yang telah dialokasikan untuk mendukung keberhasilan terlaksananya program.
- b) Tenaga Kerja, dapat diartikan dengan kuantitas dan kualifikasi sumber daya manusia yang ada di masyarakat guna melaksanakan program yang telah disahkan.
- c) Infrastruktur atau fasilitas, didefinisikan sebagai keberadaan atau ketersediaan mencakup kualitas

infrastruktur yang digunakan sebagai pendukung pelaksanaan program yang telah disahkan.

3. **Disposisi**, dapat didefinisikan sebagai bentuk sikap dan respons para pelaksana program, terhadap kebijakan dan program yang telah diimplementasikan. Menurut indikator sikap birokrasi dapat diuraikan menjadi beberapa indikator seperti berikut:

a) Dukungan dari Birokrasi, didefinisikan dengan bentuk dukungan, keterlibatan, serta motivasi dari para pelaksana program.

b) Kekuatan Birokrasi, dapat diartikan tingkat hambatan atau resistensi yang berkemungkinan muncul dari dalam sisi birokrasi terhadap perubahan atau implementasi program yang telah disahkan.

4. **Struktur Birokrasi**, dapat didefinisikan sebagai bentuk struktur serta tatanan yang ada di dalam birokrasi yang berpengaruh terhadap proses implementasi. Berdasarkan indikator tatanan birokrasi dapat diuraikan menjadi beberapa sub indikator seperti berikut:

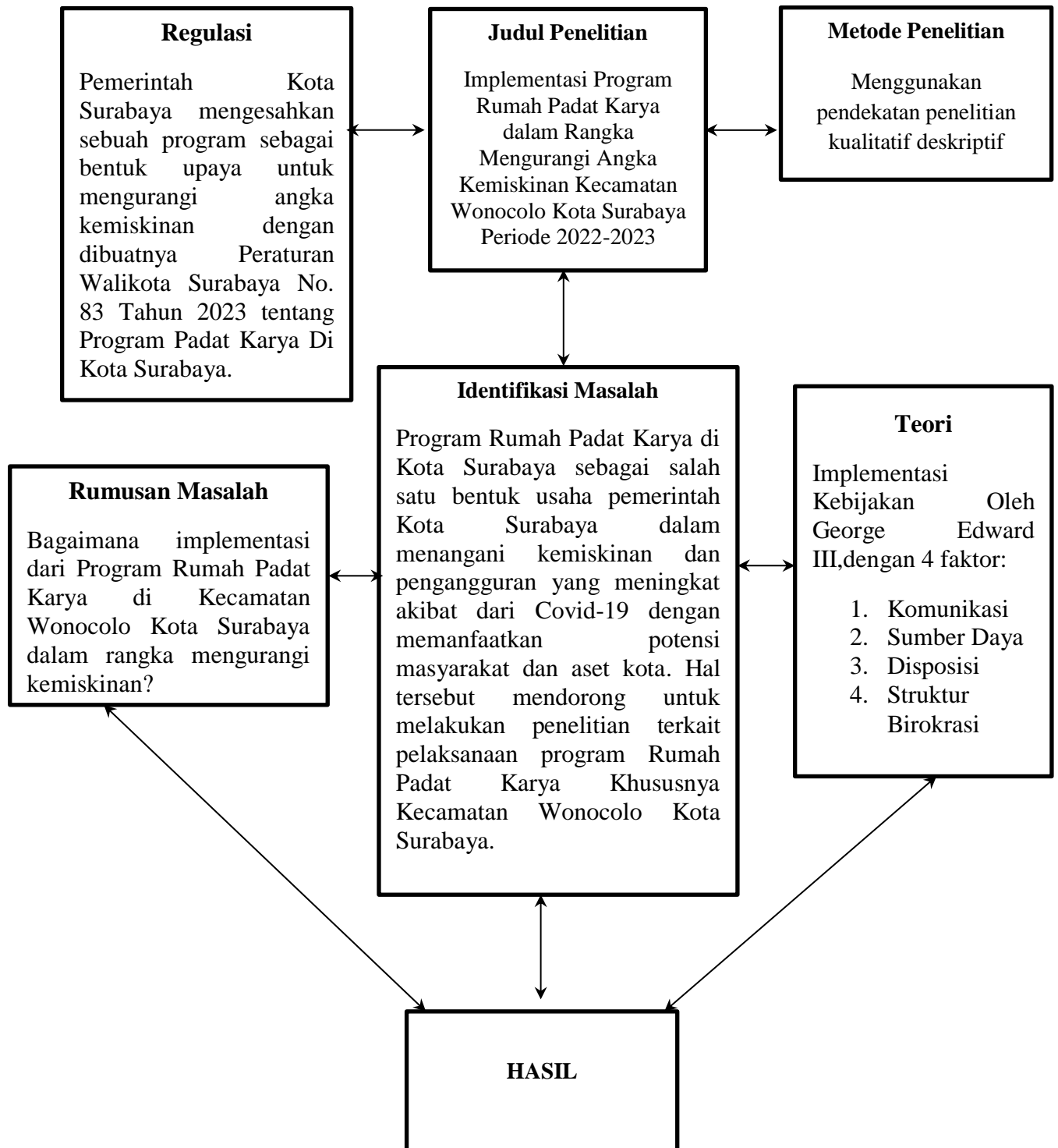
a) Hierarki Birokrasi, merupakan kejelasan dari struktur hierarki dalam organisasi, dimana hal tersebut dapat memengaruhi komunikasi serta pengambilan keputusan.

b) Koordinasi Antar Departemen, dapat diartikan dengan efektivitas dari koordinasi yang terjadi antara berbagai

departemen atau unit yang terlibat dalam implementasi program yang telah dilaksanakan.

- c) Ketentuan dan Prosedur, dapat diartikan dengan adanya ketersediaan dan kualitas ketentuan serta prosedur yang berguna untuk mengatur pelaksanaan program.

1.8 Kerangka Pemikiran Teoritis



1.9 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sebuah cara dalam mendapatkan data dalam penelitian dengan tujuan dan kegunaan tertentu secara ilmiah. Dalam metode penelitian adapula pendekatan yang bertujuan untuk menentukan perspektif dari peneliti dalam pelaksanaan penelitian. Dimulai dari latar belakang, rumusan masalah dan tujuan dalam penelitian ini dapat dikatakan bahwa pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang sangat tepat. Dalam hal ini, pendekatan kualitatif sering kali dikaitkan dengan adanya paradigma interpretif dikarenakan realitas sosial menjadi satu kesatuan yang dinamis dan mendalam. Dalam Mulyadi (2011) mengemukakan bahwa menurut Lincoln dan Guba, pendekatan kualitatif pada dasarnya memanfaatkan dirinya sebagai instrument, dengan alasan karena instrumen non manusia sering kali sulit untuk digunakan secara leluasa untuk menangkap adanya realitas dan interaksi yang terjadi di dalamnya. Proses penelitian kualitatif mengalami adanya orientasi deskripsi yang dilakukan oleh peneliti sebagai bentuk pengenalan terhadap informasi serta situasi sosial. Setelah mendapatkan informasi awal melakukan reduksi untuk mendapatkan fokus masalah. Masalah tersebut diuraikan berdasarkan dengan kategori, lalu data dikonstruksikan untuk mendapatkan pengetahuan, hipotesis, serta ilmu baru. Dan yang terakhir, disusun untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat dan bermakna (Mulyadi, 2011).

Berdasarkan dengan penjabaran melalui latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, serta manfaat dalam penelitian ini, maka pendekatan yang sesuai adalah kualitatif. Pada penelitian ini, mengidentifikasi implementasi program

padat karya sebagai bentuk perwujudan dari usaha yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya untuk mengurangi angka kemiskinan serta pengangguran di Kota Surabaya. Selanjutnya pada sub bab ini akan dibahas mengenai cara-cara yang digunakan untuk mendapatkan data dan informasi yang mendukung dan relevan dengan penelitian ini, melalui identifikasi jenis penelitian, lokasi penelitian dan focus penelitian, data penelitian, teknik pengumpulan data, serta analisis data dan interpretasi data.

1.9.1 Tipe Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian maka tujuan dalam penelitian ini adalah memotret dan mengeksplorasi situasi sosial yang ada secara menyeluruh, guna mendapatkan penjelasan yang mendalam. Maka dari itu, tujuan tersebut sejalan dengan tipe rumusan masalah deskriptif, sehingga penelitian ini ditetapkan sebagai penelitian deskriptif. Berdasarkan dengan fenomena sosial atau kenyataan sosial yang terjadi telah ada diklasifikasi dengan menggunakan deskripsi sejumlah variabel yang berkaitan dengan masalah yang tengah diteliti menjadi salah satu alasan pemilihan jenis. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini tidak sama sekali menekankan angka melainkan narasi, gambar, audio, dan dokumen untuk mendeskripsikan terkait dengan realitas sosial sesuai dengan hasil penemuan dilapangan. Sugiyono (2013) mengatakan bahwa penelitian kualitatif memperdalam makna dan informasi, maka dari itu penelitian ini dapat dialihkan atau ditransffer pada tempat lain dengan karakter serupa tidak untuk digeneralisasi.

Oleh karena itu, tipe deskriptif dinilai tepat karena tujuan penelitian ini memberikan kejelasan yang memadai terkait dengan implementasi program Rumah Padat Karya dalam rangka mengurangi angka kemiskinan di Kota Surabaya.

1.9.2 Lokasi Penelitian dan Fokus Penelitian

Lokasi yang digunakan untuk melakukan penelitian dan memperoleh data serta informasi mengenai keadaan yang sebenarnya adalah Kota Surabaya khususnya Kecamatan Wonocolo. Berdasarkan dengan fokus penelitian yang digunakan, terkait dengan Implementasi Program Rumah Padat Karya dalam mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran maka lokasi penelitiannya berada di Rumah Padat Karya Kecamatan Wonocolo, Mal Pelayanan Publik, Balai Kota Surabaya. Pemilihan Mal Pelayanan Publik dan Balai Kota Surabaya merupakan Instansi yang terkait dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan program.

1.9.3 Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa data, yang dapat dibedakan menjadi dua yakni data primer dan data sekunder. Kedua jenis data tersebut yang akan menjadi acuan untuk memecahkan rumusan masalah dari penelitian ini. Untuk penjelasan yang lebih lanjut dapat dilihat sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang secara langsung diberikan kepada pengumpul data penelitian. Data primer merupakan data yang didapatkan, diberikan, dan disampaikan secara langsung kepada peneliti. Data primer didapatkan dari objek atau sumber utama secara langsung dapat berupa hasil wawancara mendalam, observasi atau survey yang dilakukan secara langsung oleh peneliti di lokasi penelitian. Data primer yang dipakai dalam penelitian merupakan wawancara secara langsung dengan subjek penelitian. Subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah Dinas Koperasi dan UMKM, Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, dan Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Penanggungjawab Rumah Glowing Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya, Pendamping Rumah Glowing Kecamatan Wonocolo, pegawai dari setiap UKM yang ada di Rumah Glowing (Setiap UKM perwakilan 1 orang).

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang didapatkan secara tidak langsung melainkan melalui media perantara. Yang dimaksud dari data yang tidak langsung adalah berasal dari dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian,

studi kepustakaan, studi literature, laporan dari hasil penelitian, atau juga dari laporan hasil eksplorasi.

1.9.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi, dan dokumen/studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data tersebut, kemudian diuraikan menjadi berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab sepihak secara sistematis serta berlandaskan akan tujuan dari penelitian (Marzuki, 2001). Seperti dalam penelitian ini, peneliti melibatkan Penanggung Jawab Rumah Glowing Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya, Pendamping Rumah Glowing Kecamatan Wonocolo, Dinas Koperasi dan UMKM, Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, dan Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Sedangkan untuk pembicaraan informal dapat dilakukan dengan informan seperti masyarakat yang tergabung dalam usaha Program Rumah Padat Karya. Hal tersebut bertujuan untuk membangun komunikasi yang lebih santai sehingga tidak terlihat kaku dan menakutkan. Sehingga, peneliti mengajukan pertanyaan yang lebih bebas kepada subjek menuju fokus penelitian.

2. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang bercirikan spesifik dibandingkan dengan teknik lainnya seperti wawancara maupun kuesioner (Sugiyono, 2013). Dalam penelitian ini, peneliti akan mendatangi langsung lokasi penelitian yakni Rumah Glowing Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya. Namun, peneliti tidak secara langsung terlibat dalam aktivitas orang-orang yang sedang diamati. Peneliti melakukan pengamatan terhadap aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat di Rumah Padat Karya Kecamatan Wonocolo. Peneliti akan mencatat, menganalisis data yang relevan dan juga membuat kesimpulan mengenai berlangsungnya Program Rumah Padat Karya di Kecamatan Wonocolo.

3. Dokumen

Teknik pengumpulan data dokumen merupakan catatan peristiwa yang telah ada atau telah berlalu. Dokumen tersebut bisa saja berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2013). Pengumpulan data menggunakan sumber yang berasal dari jurnal, buku, makalah, dokumen-dokumen negara dan juga situs internet ataupun website resmi instansi yang terkait. Seperti pada penelitian ini menggunakan Dokumen Peraturan Perundang-undangan No. 83 tahun 2023 tentang Program Padat Karya, buku terkait dengan teori penelitian,

jurnal terkait dengan program, dan juga website resmi dari Instansi terkait dan website resmi milik Kota Surabaya.

1.9.5 Keabsahan Data

Pemeriksaan terkait dengan keabsahan data sangat berkaitan dengan validasi terhadap kebenaran data. Triangulasi data merupakan salah satu cara untuk menentukan kebenaran data melalui proses validasi silang kualitatif guna menilai kecukupan data. Selain itu, triangulasi data juga dapat diartikan dengan teknik pengecekan data dari berbagai sumber yang telah ada dengan bermacam-macam cara dan juga waktu (Wijaya, 2018:120-121). Sehingga, dapat dibedakan menjadi tiga yakni triangulasi sumber, untuk menguji kredibilitas data yang sama pada sumber berbeda. Dimana, pada penelitian ini sumber data yang diperoleh berasal dari informan yang berbeda mulai kalangan pejabat sebagai penanggungjawab hingga masyarakat sebagai penerima manfaat. Kedua, triangulasi teknik pengumpulan data, guna menguji kredibilitas data dari sumber yang sama menggunakan teknik berbeda. Seperti, pada penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data yakni wawancara, observasi, dan dokumen. Triangulasi teknik seringkali digunakan untuk mengidentifikasi kebenaran pernyataan dari informan dalam wawancara dengan kenyataan melalui observasi. Ketiga, triangulasi waktu berguna untuk mengidentifikasi kredibilitas data pada waktu dan situasi yang berbeda secara berulang untuk mendapatkan kepastian data. Penelitian ini, dilakukan dengan rentang waktu satu bulan yakni Desember-Februari 2024.

Pengujian yang dilakukan tidak menyamaratakan semuanya melainkan mendeskripsikan setiap data yang kemudian diidentifikasi untuk mengasihkan kesamaan dari makna maupun pandangan.

1.9.6 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data merupakan proses dimana mencari dan menyusun data yang diperoleh secara sistematis, baik itu berasal dari wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga mudah untuk dipahami, dan penemuannya dapat diinformasikan kepada orang lain (Sugiyono, 2013). Analisis data sendiri dilakukan dengan cara mengkoordinasikan data, lalu menjabarkan ke dalam unit-unit tertentu, melakukan adanya sintesa, menyusunnya ke dalam sebuah pola, memilah bagian yang penting serta dipelajari, dan pada akhirnya membuat kesimpulan yang nantinya akan disajikan dalam bentuk laporan penelitian dan disajikan untuk semua orang yang membutuhkannya. Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2013) aktivitas dalam analisis data terdapat tiga tahap yakni *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), dan *conclusion drawing* (penarikan kesimpulan).

Pada tahap *data reduction* (reduksi data) dalam melakukan pengambilan data dilapangan tentu saja akan mendapatkan jumlah data yang cukup banyak untuk dicatat dan diamati secara teliti dan rinci. Banyaknya data yang diperoleh membuat semakin kompleks dan rumit, maka dari itu diperlukan adanya analisis data melalui reduksi data. Reduksi data disini diartikan dengan merangkum, memilih hal-hal yang

penting serta dicari pola dan temanya. Dengan adanya reduksi data maka akan memperoleh gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Reduksi data dapat dibantu dengan adanya peralatan elektronik seperti komputer mini yang didalamnya memberikan kode pada aspek-aspek tertentu. Reduksi data merupakan proses yang memerlukan kecerdasan, keluasan dan juga kedalaman wawasan yang tinggi.

Setelah melakukan reduksi data, kemudian data yang telah kredibel disajikan. Setelah direduksi tentu data yang diperoleh akan semakin padat dan terorganisir sehingga akan memudahkan proses pengambilan makna, pemahaman, serta interpretasi. Dalam penelitian kualitatif penyajian data seringkali dituangkan dalam bentuk narasi, uraian singkat, bagan, dan sebagainya (Sugiyono, 2013). Hal tersebut untuk mendeskripsikan suatu kronologi peristiwa yang terjadi, ilustrasi, dan keterhubungan antar topik. Dengan melakukan adanya penyajian data dapat memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi lalu dapat merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan dengan apa yang telah dipahaminya.

Dan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan. Dalam tahap ini biasanya terjadi dua kali penarikan kesimpulan, dimana kesimpulan awal dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah seiring dengan ditemukannya bukti-bukti yang lebih mendukung dan valid. Jika, pada tahap awal kesimpulan telah didukung oleh data yang valid maka

kesimpulan dapat bersifat kredibel. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang dirumuskan.